

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Emilia Emharis¹, Sarjan², Mellio Fitria³.
^{1, 2 dan 3}Dosen Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
29566

ABSTRAK

Pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak di implementasikan. Namun daeri sekian banyaknya program yang telah dibuat tidak semuanya berdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program terbaru yang dibuat oleh pemerintah terkait program adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada masyarakat miskin. Namu program ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaanya diberbagai daerah dan wilayah, salah satunya adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn trntang implementasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi dengan menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti dapatkan melalui metode observasi, wawancara dengan berbagai sumber, serta beberapa dokumentasi didapatkanlah hasil penelitiannya adalah yang mana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecmatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, hal ini juga ditambahkan dengan hasil analisa peneliti.

Kata Kunci: Implementasi, BPNT

***IMPLEMENTATION OF NON CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN
SUB-DISTRICT PANGEAN KUANTAN SINGINGI REGENCY***

Emilia Emharis¹, Sarjan.M², and Mellio Fitria³
^{1, 2 dan 3} lecturer Study Program State Administration
Faculty of Social Science
Islamic University of Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kuantan Singingi Regency,
Riau 29566

ABSTRACT

The implementation of government programs aimed at improving the welfare of the community has been implemented a lot. However, not all of the programs that have been made have a positive impact and improve people's welfare. One of the latest programs made by the government related to the program is Non-Cash Food Assistance (BPNT) given to the poor. However, this program also experienced obstacles in its implementation in various regions and regions, one of which was in Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The problem formulation in this research is to find out how the implementation of the non-cash food assistance program in the District of Pangean, Kuantan Singingi District and the objective is to find out the implementation of the non-cash food assistance program in the District of Pangean, Kuantan Singingi. The theory used in this research is the Van Metter and Van Horn theory about implementation. This type of research is a type of qualitative research. The place or location of the research is Pangean Subdistrict, Kuantan Regency, singing using the research methods, namely observation, interviews, and documentation. Based on the field research results that researchers got through the method of observation, interviews with various sources, as well as some documentation it was found that the results of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi District had run well, this was also added to the results of the researchers' analysis.

Keywords: Implementation, BPNT

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan dan pengangguran yang meluas sangat mudah ditemukan di negara-negara yang telah dianggap keberhasilan membangun ekonomi, teknologi dan industri. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin Indonesia

selalu meningkat, tidak terkecuali di Provinsi Riau, yang mana pada tahun 2019 saja masyarakat miskin di Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti yang data yang diberitakan Riau Pos hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 yang memberitakan penduduk miskin di Riau bertambah 4.010 jiwa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana,

dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam menangani masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, telah banyak daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang mana bukti nyata yang dilakukan adalah dengan banyaknya program-program yang dilaksanakan dari tahun ketahun untuk menaggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah baru-baru ini adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun isi dari Perpres No 15 Tahun 2010 yaitu, "Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usahadan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat". Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non

Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di E-Warung. apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, belum mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap bantuan tersebut. Sehingga dengan demikian, masyarakat sebagai penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merasa dirugikan, hal ini sesuai dengan kejadian pada masyarakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beberapa waktu yang lalu, sesuai dengan diinfokan oleh media Online Go Riau pada hari Senin 3 desember 2018 15.08 wib.

Hal lain yang menyebabkan belum berjalan dengan maksimalnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut adalah adanya tempat-tempat atau warung-warung yang sudah ditunjuk untuk pengambilan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut belum aktif, sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengambalnya. Padahal masyarakat sudah sangat berharap terhadap bantuan tersebut, seperti juga yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi yang

dihimpun oleh Go Riau pada Selasa desember 2018 03.07 wib, dengan tema pemberitaannya adalah Belum aktif, pemilik e-warung dikuansing sitas KKS orang miskin. Sehingga dengan demikian, banyak fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan menyebabkan permasalahan tidak tercapainya program pemerintah tersebut dalam penganggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi”**.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah Manfaat Teoritis yaitu, Sebagai aplikasi dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya implementasi kebijakan pemerintah. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan permasalahan yang sama. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan fungsinya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survey, dengan tingkat eksplanasi Deskriptif serta menggunakan analisis data Kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Pangean sebagai penerima manfaat dan pemilik warung yang telah ditunjuk untuk pengambilan barang bantuan tersebut serta unsur pemerintah kecamatan sebagai penyelenggara program ditingkat kecamatan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu memberikan peluang yang sama kepada setiap populasi untuk dijadikan sampel dan dianggap lebih memahami.

LANDASAN TEORI

1. Teori Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “administratie” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor) Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “Administrare” yang artinya Ad = pada, ministrare = melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat Diartikan Bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor” (pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain

sebagainya). Menurut Sondang P. Siagian, Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu.

2. Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Leo Agustino dalam *Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Aktor Implementasi Kebijakan

Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:29) bahwa yang termasuk dalam pembuatan kebijakan secara normative adalah legislative, eksekutif, administrator, dan para hakim.

1. Legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan.
2. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
3. Lembaga peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.

Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,

penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

3. Teori Kemiskinan

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan pada umumnya banyak terdapat dan dijumpai pada Negara-negara yang sedang berkembang dan Negara keterbelakangan. sangat jarang kita menjumpai adanya masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan terdapat pada Negara-negara yang sudah maju, atau sering kita sebut dengan Negara industry.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,

dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll. Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* (2012:17) mengatakan bahwa kemiskinan dapat dikategorikan kedalam empat kategori yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan relative, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai (Rp10.000 per KPM per bulan) melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. Warung gotong royong elektronik (e-warong) merupakan istilah yang digunakan dalam program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung kelontong, e-Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Layanan Keuangan Tanpa kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Agen Laku Pandai), Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1)
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017

Penerima BPNT adalah KPM BPNT, yang merupakan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen

terendah di daerah pelaksanaan. Pada 2017, terdapat 1.200.000 penerima manfaat BPNT yang tersebar di 44 kota pelaksanaan program ini. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan kesiapan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah. BPNT juga dilaksanakan di beberapa kabupaten pada 2017 untuk mengujicobakan mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi daerah pedesaan.

Anggaran untuk program BPNT berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program BPNT mencapai Rp1.596.335.636.636. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan Rp110.000 per bulan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat BPNT.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil dan menggunakan 23 Informan sebagai informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini sehingga total informan adalah 23 orang. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat indikator sebagai alat ukur terlaksana atau tidaknya program bantuan pangan non tunai tersebut di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana empat indikator tersebut adalah indikator komunikasi, indikator disposisi, indikator sumber daya, dan indikator struktur birokrasi.

Indikator Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator dalam mengukur suatu

keberhasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti terutama akan membahas tentang indikator komunikasi. implementasi suatu kebijakan berjalan sesuai yang direncanakan, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Ada tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsisten. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait komunikasi terhadap informasi program bantuan pangan non tunai tersebut, yang mana pemerintah melalui beberapa kepala desa dan juga media sosial telah disampaikan kepada seluruh masyarakat terutama keluarga penerima manfaat atau KPM di desa masing-masing. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil analisa peneliti di lapangan dan juga dengan adanya dukungan data dari dokumentasi dapat dilihat bahwa memang secara keseluruhan dari indikator komunikasi memang sudah berjalan secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara dan juga analisa peneliti. Selain dari pada itu dapat juga dilihat memang banyaknya masyarakat atau keluarga manfaat yang telah bersenang hati dengan program tersebut. Hal ini tentu dampak dari oleh beberapa hal diantaranya adalah memang adanya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dan juga adanya kesadaran masyarakat dalam dalam menyampaikna terkait bantuan program bantuan pangan non tunai tersebut, sehingga akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat kecamatan pangean dan masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya.

Indikator Sumber Daya

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator sumber daya. Sumber daya merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan sumber daya disini adalah suatu kekuatan atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh unsur dari pelaksana dari kebijakan tersebut, yang mana orang-orang atau para aktor dari implementasi tersebut sangat berperan penting untuk menciptakan keterlaksanaan dari sebuah implementasi kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Untuk melihat atau terlaksananya indikator dari sumberdaya tersebut, disini peneliti memberikan tiga pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, yang mana semua unsur dari informan tersebut akan dilampirkan kutipan hasil wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait sumber daya terhadap informasi program bantuan pangan non tunai tersebut, yang mana pemerintah melalui beberapa kepala desa dan juga media sosial telah bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab terhadap masyarakat terutama keluarga penerima manfaat atau KPM di desa masing-masing.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil analisa peneliti di lapangan dan juga dengan adanya dukungan data dari dokumentasi dapat dilihat bahwa memang secara keseluruhan dari indikator sumber daya memang sudah berjalan secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara dan juga analisa peneliti. Selain dari pada itu

dapat juga dilihat memang banyaknya masyarakat atau keluarga manfaat yang telah bersenang hati dengan program tersebut. Hal ini tentu dampak dari oleh beberapa hal diantaranya adalah memang adanya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dan juga adanya kesadaran masyarakat dalam dalam menyampaikna terkait bantuan program bantuan pangan non tunai tersebut, sehingga akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat kecamatan pangean dan masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya.

Indikator Disposisi

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator disposisi. Disposisi merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan disposisi disini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengangkat atau menunjuk suatu petugas atau pelaksana dari kebijakan itu sendiri, karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan kepentingan orang banyak.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil analisa peneliti di lapangan dan juga dengan adanya dukungan data dari dokumentasi dapat dilihat bahwa memang secara keseluruhan dari indikator sumber daya memang sudah berjalan secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara dan juga analisa peneliti. Selain dari pada itu dapat juga dilihat memang banyaknya masyarakat atau keluarga manfaat yang telah bersenang hati dengan program tersebut. Hal ini tentu dampak dari oleh beberapa hal diantaranya adalah memang adanya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dan juga adanya kesadaran

masyarakat dalam dalam menyampaikna terkait bantuan program bantuan pangan non tunai tersebut, sehingga akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat kecamatan pangean dan masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya.

Indikator Struktur Birokrasi

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait struktur birokrasi terhadap informasi program bantuan pangan non tunai tersebut, yang mana pemerintah melalui beberapa kepala desa dan juga media sosial telah bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab terhadap masyarakat terutama keluarga penerima manfaat atau KPM di desa masing-masing. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil analisa peneliti di lapangan dan juga dengan adanya dukungan data dari dokumentasi dapat dilihat bahwa memang secara keseluruhan dari indikator sumber daya memang sudah berjalan secara maksimal, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara dan juga analisa peneliti. Selain dari pada itu dapat juga dilihat memang banyaknya masyarakat atau keluarga manfaat yang telah bersenang hati dengan program tersebut. Hal ini

tentu dampak dari oleh beberapa hal diantaranya adalah memang adanya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dan juga adanya kesadaran masyarakat dalam dalam menyampaikna terkait bantuan program bantuan pangan non tunai tersebut, sehingga akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat kecamatan pangean dan masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisa peneliti yang didapat dengan bergaia metode, yaitu melalui wawancara dengan informan, melalui dokumentasi peneliti di lapangan dan analisan serta obsevasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dikecamatan pangean kabupaten kuantan singingi sudah berjalan cukup baik. Dari analisa peneliti dilapangan yang dianalisa dari beberapa indikator, yang mana terdapat empat indikator. Adapun hasil dari indikator pertama yaitu komunikasi, yang mana dari hasil wawancara dan analisa peneliti dapat diketahui bahwa komunikasi antara semua elemen atau petugas dengan keluarga penerima manfaat juga sudah terjalin dengan baik, sehingga untuk indikator komunikasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Indikator kedua yaitu sumber daya, berdasarkan hasil wawancara dan juga nalisa peneliti dilapangan dapat dilihat yang mana indikator tersebut sudah berjalan secara maksimal dan sedikit mengalami kendala-kendala tertentu dalam pelakasanaan program bantuan pangan non tunai tersebut yang ada di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

Dan indikator disposisi berdasarkan hasil wawancara, dokumnetasi da juga analisa peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa indikator disposisi juga sudah berjalan dengan maksimal dan jarang dijumpai

hal-hal yang seharusnya menjadi bahan evaluasi, terutama kurangnya sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat dari program bantuan pangan non tunai tersebut. Serta indikator terakhir adalah indikator struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan analisa peneliti dilapangan, dapat dilihat bahwa indikator ini cukup terlaksana dengan baik, yang mana etika, moral dan sikap para pelaksana sudah sangat baik dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut yang ada di kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga hal yang demikian seharusnya dapat dipertahankan lagi untuk masa yang akan datang kedepannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisa peneliti dilapangan berdasarkan dari empat indikator, semua indikator dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barthos, Basir, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu SP 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Hamalik, Oemar, 2001. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Husein Umar. 1999. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didapat melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi serta analisa peneliti dilapangan, maka hasil penelitiannya adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan baik sebagai mana mestinya.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran yang tujuannya adalah untuk kebaikan dan kemajuan semata, adapun sarannya adalah sebagai berikut, Kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan khususnya Pemerintah Kecamatan Pangean diharapkan adanya perhatian yang lebih serius dalam penyaluran dan pengelolaan Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tersebut agar lebih baik lagi.

PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (editor), 2008. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES Indonesia, Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga
Prof.DR. Sugiyono.2003.*Metode Penelitian Administrasi*.Alfabeta, Bandung.

Rachmawati, Ike Kusdyah, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi.

Saudjana, 2000. Program Pendidikan, Bandung, Falah Production.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta, Erlangga.

Saydam, Gouzali, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Djembatan.

Siagian, Sondang P, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta. Bandung.